

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 dilaksanakan oleh 4 (empat) organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kecamatan Kalikajar dan Kelurahan Kalikajar.

a. Alokasi Pendanaan

Anggaran yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 adalah sebesar **Rp7.418.237.854,00**, sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar **Rp7.021.697.386,00** atau 94,65% dari alokasi. Proporsi anggaran belanja untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 0,36% dari total belanja APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 yang berjumlah **Rp2.072.393.505.735,00**.

Program dan alokasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.4.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	3.460.220.580	3.303.625.487	95,47
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.285.621.780	1.237.574.388	96,26
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	302.998.800	300.398.510	99,14
3	Program peningkatan disiplin aparatur	105.600.000	105.200.000	99,62
4	Program Pengembangan Perumahan	1.491.000.000	1.425.753.600	95,62
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	150.000.00	110.746.600	73,83
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	125.000.000	123.952.389	99,16
B	Belanja Tidak Langsung	3.958.017.274	3.218.071.899	93,94
	Jumlah Total	7.418.237.854	7.021.697.386	94,65

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diampu. Anggaran untuk program ini dimanfaatkan untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mencakup kegiatan pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan, akan tetapi untuk pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor tidak dilaksanakan dikarenakan output dari kegiatan adalah perbaikan internet dimana selama tahun 2018 ini apabila ada kerusakan diperbaiki oleh PT. Telkom tanpa dikenakan biaya.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dimanfaatkan untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

4) Program Pengembangan Perumahan

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung pengembangan perumahan di Kabupaten Wonosobo. Program Pengembangan Perumahan dijabarkan dalam kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, Penataan Lingkungan Kumuh (Pajak Rokok), Pendamping Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (DAK), Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Pedesaan dan Penyusunan Kebijakan/Regulasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

Untuk Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dilaksanakan secara swakelola dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan stimulan pembangunan perumahan untuk

mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu berupa sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dan pusat. Dan kegiatan Penataan Lingkungan Kumuh (Pajak Rokok) yang bertujuan mempercepat penanganan permukiman kumuh khususnya di lokasi perumahan dan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 653/247/2014, yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Jaraksari, Penataan Lingkungan Kelurahan Sambek, Penataan Lingkungan Kelurahan Mlipak, Penataan Lingkungan Wonosobo Timur dan Penataan Lingkungan Kelurahan Wonosobo Barat yang biasa disebut kawasan Jasalaktimbar, di mana 5 (lima) paket pekerjaan ini dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak penyedia jasa konstruksi. Sedangkan untuk kegiatan Pendamping Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (DAK) merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan dan dilaksanakan secara swakelola yang antara lain berupa honorarium pelaksana kegiatan, sosialisasi, rapat-rapat koordinasi, monitoring, dan koordinasi ke luar daerah. Untuk kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Pedesaan berupa pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan di kelurahan Jaraksari yang bertujuan untuk mengurangi luasan kawasan kumuh. Adapun untuk kegiatan Penyusunan Kebijakan/Regulasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang tidak dilaksanakan.

5) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan untuk isu penanganan kawasan kumuh. Sebagaimana diketahui, tahun 2018 Kabupaten Wonosobo mendapatkan fasilitasi dari APBN berupa Fasilitasi Kegiatan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial-Ekonomi Wilayah (PISEW).

Untuk kegiatan KOTAKU, pagu dana dari Pusat tahun 2018 berjumlah Rp 7 milyar untuk penanganan 5 kawasan kumuh yaitu Kelurahan Jaraksari, Sambek, Mlipak, Wonosobo Timur dan Wonosobo Barat.

Sedangkan program PISEW mendapat alokasi dana Rp 4,2 milyar untuk pembangunan 6 jalan dan 1 jembatan di Kecamatan Kertek, Kepil, Wonosobo, Selomerto, Leksono, Mojotengah, dan Watumalang.

Pendanaan dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi ini memberi dampak positif dalam program penanganan kawasan kumuh mengingat keterbatasan dana APBD, sementara permasalahan dalam penanganan kawasan kumuh di Wonosobo masih banyak. Untuk itu, pagu dana dari APBD sejumlah Rp 150 juta dialokasikan sebagai penunjang bagi kegiatan dari Pusat tersebut.

6) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program lingkungan sehat perumahan dilaksanakan untuk menunjang sasaran pokok pencapaian indikator peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan

IV.B.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dijabarkan dalam kegiatan Fasilitasi Jambanisasi Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Kalikajar dan Kelurahan Kalikajar.

c. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.B.4.2
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2017	Target 2018	Realisasi Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian
1	Rasio Rumah Layak huni	0,761	0,900	0,776	86,27	◇
2	Kekurangan tempat tinggal (<i>backlog</i>) berdasarkan perspektif menghuni	21.575	31.966	36.615	85,46	◇
3	Cakupan rumah layak huni terjangkau	3,96%	6,00%	5,37%	89,50	◇
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1,342	0,890	1,314	147,64	●
5	Persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana	2,73%	4,00%	0,64%	16,00	△ △ △ △

Sumber: Dinperkimhub, DPUPR, BPBD, DPMPST, 2018

Keterangan Status Capaian:

●	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 secara umum berada pada posisi capaian “akan tercapai”. Akan tetapi masih terdapat indikator kinerja program yang perlu kerja keras untuk pencapaiannya yaitu persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana. Adapun untuk indikator kinerja program rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk berada pada posisi telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi capaian pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 rata-rata di

IV.B.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

lebih tinggi kecuali untuk indikator persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana yang capaiannya menurun. Hal ini dikarenakan kondisi kerusakan rumah akibat bencana umumnya rusak ringan sehingga relatif dapat ditangani dengan gotong royong warga dan komponen bangunan yang rusak bukan bangunan utama.

Walaupun realisasi capaian tahun 2018 rata-rata lebih tinggi dibanding tahun 2017 akan tetapi apabila dibandingkan target yang ditetapkan di tahun 2018 rata-rata capaian indikator program masih dibawah target. Hanya ada satu indikator yang melebihi target yaitu rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, yang sejak tahun 2017 memang sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam Tabel Matriks Permasalahan dan Solusi sebagai berikut:

Tabel IV.B.4.3
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Permasalahan	Solusi
1	Tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH)	Penanganan masalah rumah tidak layak huni, telah dilakukan beberapa upaya di antaranya integrasi berbagai program termasuk melibatkan CSR dan dana non APBN/APBD. Diharapkan ke depannya keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat ditingkatkan lagi.
2	Sulitnya mendapatkan data di bidang perumahan khususnya data jumlah rumah dengan tingkat akurasi tinggi	Perlunya dibangun sistem informasi perumahan satu data yang salah satunya memuat secara detail data kepemilikan rumah di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, yang diintegrasikan dengan sistem pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) untuk segala proses perizinan, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3	Rendahnya kepemilikan rumah	Penanganan langsung pada sasaran melalui upaya peningkatan akses kredit kepemilikan rumah, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjamin pelaksanaan program ini. Kerjasama dengan perbankan merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh.
4	Trend alokasi dana APBD untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang terlalu	Perlunya reformulasi kebijakan/politik anggaran di bidang penanganan kawasan kumuh. Apabila selama ini masih banyak menggantungkan dari dana Pusat, alokasi dana APBD perlu ditambah untuk mempercepat

IV.B.4. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No.	Permasalahan	Solusi
	kecil dibandingkan dengan <i>gap</i> IKU RPJMD yang harus ditangani	penanganan kawasan kumuh di Wonosobo.